



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-170/PK/2020 05 Mei 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Raperda tentang PDRD sesuai Surat Dirjen BKD
Kemendagri No.973/983/Keuda Tanggal 20 Maret 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/983/Keuda tanggal 20 Maret 2020 hal
sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah mereviu Raperda Kota Pontianak tentang Pajak Daerah dan menurut pendapat kami raperda tersebut masih perlu penyempurnaan dan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan usaha merupakan objek PPN sehingga tidak termasuk objek pajak hotel.
 - b. Penambahan ayat dalam Pasal 66 yang mengatur tentang wilayah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - c. Penjelasan pasal 17 ayat (3) huruf h dihapus karena dinilai dapat menimbulkan kesalahan penafsiran, mengingat permainan komputer dan internet seperti permainan menggunakan teknologi multimedia, *game online* tidak termasuk objek Pajak Hiburan.
2. Hasil reviu terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kota Pontianak untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir)
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S -170 /PK/2020
Tanggal : April 2020

**Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Pontianak	Pajak Daerah	-		Selesai

